



► **KESEJAHTERAAN PEKERJA**

# Upah Buruh Diklaim di Atas KHL

**JOGJA**—Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memastikan upah minimum kota (UMK) Jogja naik.

*Ujang Hasanudin  
hasanudin@harianjogja.com*

► Hasil penghitungan upah 2018 yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Jogja mengacu pada PP No.78/2015 tentang Pengupahan Sebagai Komponen.

► Buruh menilai upah sekitar Rp1,7 juta di Jogja tidak layak.

Haryadi belum bisa menyampaikan besaran kenaikannya sebelum dilaporkan kepada Gubernur DIY. Namun, kenaikan upah itu diklaimnya sudah melebihi kebutuhan hidup layak (KHL) di Jogja.

Rencananya upah 2018 kabupaten/kota akan dibahas bersama Gubernur DIY, Kamis (26/10) besok. "Saya tidak berani mendahului beliau [Gubernur DIY] mengumumkan upah," kata Haryadi saat akan menghadiri rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Selasa (24/10).

Haryadi mengatakan, hasil penghitungan upah 2018 yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Jogja mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan Sebagai Komponen. Dalam PP tersebut nilai upah tahun depan merupakan hasil dari perhitungan upah tahun berjalan dikalikan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jika mengacu pada data *bi.go.id* nilai inflasi September 2017 sekitar 3,72% dan prediksi pertumbuhan ekonomi 2018 sekitar 5,1%-5,5%. Sementara UMK Jogja tahun ini sebesar Rp1.572.200. Dengan asumsi inflasi 3% dan pertumbuhan ekonomi 8%, kenaikan upah Kota Jogja sekitar Rp1,7 jutaan.

Haryadi berkukuh, belum bisa menyebutkan angka inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi yang dikirim dari Pemerintah Pusat ke daerah sebagai acuan penentuan upah tahun depan. Ia berseloroh, nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi bisa 6%, 8%, dan 10 persen.

Yang jelas, Wali Kota Jogja dua periode ini memastikan, nilai upah tahun depan lebih besar dari tahun ini dan kenaikan upah itu diklaimnya sudah melebihi kebutuhan hidup layak di Jogja. "Sudah kami hitung, sudah di atas KHL," ucap Haryadi.

Juru bicara Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan menanggapi jika kenaikan upah sekitar Rp1,7 juta di Jogja dinilai tidak layak. "Sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup layak buruh dan keluarganya," kata Irsad.

DPD KSPSI memiliki hitungan sendiri soal upah tahun depan untuk kabupaten dan kota se-DIY. Namun baru akan ia sampaikan dalam jumpa pers, hari ini.

**UMK DI DIY DARI TAHUN KE TAHUN**

Tahun	Jogja	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul
2013	Rp1.065.247	Rp1.026.181	Rp993.484	Rp954.339	Rp947.114
2014	Rp1.173.300	Rp1.127.000	Rp1.125.500	Rp1.068.000	Rp980.500
2015	Rp1.302.500	Rp1.200.000	Rp1.163.800	Rp1.138.000	Rp1.108.249
2016	Rp1.452.400	Rp1.338.000	Rp1.297.700	Rp1.268.870	Rp1.235.700
2017	Rp1.572.200	Rp1.448.385	Rp1.404.760	Rp1.373.600	Rp1.337.850

Keterangan: Jogja Sleman Bantul Kulonprogo Gunungkidul Sumber: Bekerjaca & Pustek Harian Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005